

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Charles Simbura, 2011, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah Dan Sistemnya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Dennis Thompson, 2002, *Etika Pejabat Negara*, Ed: Terjemahan, Kakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- HRT. Sri Soemnatri M, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remeja Rosda Karya.
- Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan 15, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia.
- Mulyana W. Kusumah, 1986, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Yokyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rizal Snanto, 2009, *Buku Ajar Etika Profesi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rozali Abdullah, 2006, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudolf Pasaribu, 1998, *Teori Etika Profesi*, Medan, Pieter Medan.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Mengutamakan Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Suharsimi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Suhrawadri K. Lubis, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumaryono, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Widaryanti, Pengertian Etika dan Profesi Hukum, *Jurnal Business Ethics and Accountant Professional Ethics*, Vol. 2 No. 1 Juni 2007.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.



B. Data Internet, Makalah, Wawancara

Anom Surya Putra, *Mekanisme Kerja Badan Kehormatan*, Makalah disampaikan untuk pelatihan Badan Kehormatan oleh LSPPAD, Hotel Mercure Jakarta, 22 April 2006.

DPRD Kota Padang, *45 Nama-Nama Anggota DPRD Padang 2014-2019*, <https://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/inilah-45-nama-nama-anggota-dprd-padang-2014-2019/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

Ida Budhiati, *Konstitusionalitas KPU*, <https://idabudhiati.wordpress.com/2012/08/16/konstitusionalitas-kpu/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2017.

Wawancara dengan Asrizal (wakil ketua DPRD 1), wawancara dilakukan pada tanggal 1 November 2016.

Wawancara dengan H. Yendril (Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Padang), wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 November 2016.

Wawancara dengan Marzuki (Sekretaris Badan Kehormatan DPRD Kota Padang - Non Anggota Legislatif), wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2015
Tentang Kode Etik;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun
2015 Tentang Struktur Badan Kehormatan.

